

**MEREFLEKSIKAN HUBUNGAN ANTARA ETIKA
ARISTOTELIAN DAN BISNIS DENGAN STUDI KASUS
LUMPUR LAPINDO**

Agustinus W. Dewantara

Abstract

Oftentimes, the link between ethics and business escapes our notice. Business practices in Indonesia often wax corruptive and conspiring, with the misuse of representation and power, and rife with immorality. Yet, business is precisely often related to economic power and the ways of controlling it. Ethics allows the science of business to develop virtues through each action that involves the use of economic power. Truly ethical conduct is the dream of every man. That is why doing business should not be equated to “dirty play”. Aristotle can become a reference point for the study of national ideals organized by a government that is just and good. The discussion of this topic takes the mudflow case of Lapindo in Sidoarjo as an example. We hope that this study could be a little contribution to the study of ethics in the national life of Indonesia and the social life of our people, two things that one feels is continually sinking into the mire as time passes.

Keywords

Business, Ethics, Aristotle, Lapindo, Virtue.

Abstrak

Seringkali keterkaitan antara etika dan bisnis luput dari perhatian kita selama ini. Praktek-praktek berbisnis di Indonesia seringkali menampilkan wajah yang koruptif yang berkonspirasi dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta immoralitas. Padahal, bisnis justru seringkali berkaitan dengan kajian atas kekuatan-kekuatan ekonomi dan bagaimana mengontrolnya. Etika memberi kemungkinan kepada ilmu bisnis untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan dalam setiap perilaku yang bertumpu pada kekuatan ekonomi. Kehidupan etis sejatinya merupakan mimpi setiap orang. Oleh karena itu, berbisnis tidak boleh merupakan “permainan kotor”. Aristoteles bisa menjadi rujukan pembelajaran bagi cita-cita negara dengan pemerintahan yang adil dan baik. Diskusi dengan tema ini mengambil contoh kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Harapannya, ada secercah kontribusi bagi etika dalam kehidupan bernegara Indonesia dan kehidupan sosial masyarakat kita (dua hal yang dirasakan semakin merosot dari waktu ke waktu).

Kata-kata Kunci

Bisnis, Etika, Aristoteles, Lapindo, Keutamaan.

1. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir ini masyarakat Sidoarjo dihadapkan kepada situasi hidup yang kian hari kian memburuk. Bencana luberan lumpur yang mereka terima akibat eksplorasi serampangan Lapindo telah mengakibatkan mereka kehilangan masa depannya. Berbagai cara dilakukan untuk menuntut tanggungjawab korporasi yang telah merenggut mimpi mereka, tetapi sampai detik ini tidak kunjung membuahkan hasil. Anehnya Polda Jawa Timur bahkan telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) atas Lapindo.

Kasus Lapindo yang berkepanjangan ini membuat sebagian besar korban lumpur menderita. Jumlah penduduk miskin terus bertambah dari hari ke hari, bahkan banyak dari antara mereka tidak lagi bisa mengembangkan kemanusiaannya secara optimal. Pemerintah pun telah turun tangan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Tidak ada penyelesaian yang tuntas. Pejabat daerah tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa dan nasib korban lumpur pun makin terkatung-katung. Situasi di atas tentu menjadi keprihatinan setiap warga yang peduli pada nasib bangsanya. Berbagai upaya telah diambil, terutama oleh pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa, namun perbaikan yang diharapkan ternyata belum juga datang dengan segera. Mereka kecewa karena politik dan bisnis tak lagi diabdikan bagi kepentingan mereka.

2. Kasus Lapindo sebagai Bentuk Bisnis Korporasi yang Tidak Menyertakan Etika

2.1. Tragedi Semburan Lumpur Lapindo

Banjir lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar dua belas kilometer sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator Blok Brantas. Semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut.

Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi enam meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.¹

Genangan lumpur Lapindo yang sudah mencapai luas tujuh kilometer persegi dengan kedalaman tiga sampai sepuluh meter sudah

1 **Bdk.** <http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/>, diakses pada 1 Nopember 2011, pk. 09.00 WIB

semakin membahayakan Sidoarjo, Jawa Timur. Pembuangan lumpur di Sungai Porong memang amat dilematis, di satu sisi hal itu diperlukan untuk menyelamatkan tanggul, tetapi di sisi lain para petambak udang dan ikan akan merugi. Lamhir Syam Sinaga, dosen Universitas Bengkulu yang kini tengah mengikuti pendidikan S-3 Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, di Bengkulu, Minggu (18/10), mengatakan: *“Bila masyarakat petambak ikan tetap menolak genangan lumpur dialirkan ke Sungai Porong, bahayanya akan lebih besar sehubungan genangan dapat menjebol tanggul.”*²

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau tanggul genangan Lapindo yang sudah seperti lautan itu jebol, maka bukan hanya Porong yang akan tergenang, tetapi juga Sidoarjo. Bahkan sebagian Kota Surabaya juga akan terkena dampaknya. *“Luas genangan sudah mencapai tujuh kilometer persegi. Kalau saja jebol, saya tidak dapat membayangkan bagaimana dahsyat dampaknya. Sekarang pengaliran lumpur ke sungai diprotes masyarakat, sehingga terjadi stagnasi. Ini berbahaya.”*³

Tambak ikan adalah pengasilan utama warga Desa Tegal Sari, Jabon, Sidoarjo, yang berjarak sekitar dua puluh kilometer dari pusat semburan. Dampak ekonomi sangat terasa pasca-Lapindo mengalirkan lumpur ke Sungai Porong. Warga sangat mengeluh dengan turunnya penghasilan karena semburan lumpur tersebut. Penghasilan warga Tegal Sari menurun drastis sejak Lapindo mengalirkan lumpur ke Sungai Porong. Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.⁴ Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (*cardiac aritmia*), dan gangguan ginjal.⁵

2 **Bdk.** <http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/18/1826/5/101/Genangan-Lumpur-Lapindo-makin-Bahayakan-Sidoarjo#at> diakses pada 1 Nopember 2012, pk. 09.00 WIB

3 **Ibid.**

4 **Ibid.**

5 **Ibid.**

Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur (*liquefaction*) adalah gempa Yogya yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa di Yogyakarta yang terjadi karena pergeseran Sesar Opak tidak berhubungan dengan Surabaya.⁶

2.2. Lapindo sebagai Sebuah Korporasi

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki lima puluh persen *participating interest* di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur. Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang *casing*.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan *casing* berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk memasang *casing* (selubung bor) sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang *casing*, sehingga pada saat terjadi *underground blow out*, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.

Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil/*production sharing contract* (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam. Orientasi *profit an sich* yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di Kecamatan Suko, Tuban, milik

6 **Ibid.**

Devon Canada dan Petrochina (2001). Kadar hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan dua puluh petani dirawat di rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah karena eksplorasi Premier Oil (2002). Yang terakhir, tepat dua bulan setelah tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.⁷

Di wilayah akademis, kejahatan korporasi biasanya dimasukkan sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Kekhasannya adalah kejahatan ini dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manager, karyawan, pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun saingannya. Di Indonesia belum tersedia data memadai yang memberi gambaran menyeluruh tentang rentang dan akibat dari jenis kejahatan ini. Akan tetapi, di Australia, total kerugian dari kejahatan korporasi lebih besar dari total kerugian dari seluruh kejahatan individual.⁸

Cakupan wilayah kejahatan korporasi sangat beragam. Setidaknya ada sepuluh wilayah pokok kejahatan korporasi: pelanggaran peraturan sekuritas, penggelapan pajak, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perusakan lingkungan, penipuan konsumen, praktek perdagangan yang monopolistis, pelanggaran atas standarmakanan, pelanggaran prinsip kehati-hatian, pelanggaran atas hak karyawan dan praktek-praktek diskriminatif.⁹

Bicara tentang hukum, sama seperti juga hukum lainnya termasuk kejahatan jalanan, hukum atas kejahatan korporasi adalah sebuah persoalan politis. Yang terjadi dalam peristiwa politis adalah tawar-menawar yang mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Celakanya, dalam sistem yang demokratis rata-rata kekuatan

7 **Ibid.**

8 **Bdk.** Biles, 1987

9 **Bdk.** Grabosky dan Braithwaite: 1987

menawar warga telah ditransfer kepada institusi-institusi besar yang menghilangkan akuntabilitas publik. Singkatnya, selalu saja ada jaring-jaring bisnis yang mengglobal, demikian juga praktik-praktik politis yang dilakukan oleh korporasi-korporasi raksasa, dan ini terjadi juga di Indonesia dengan kasus Lapindo.

3. Bisnis Korporasi Yang Beretika dalam Kacamata Etis Aristoteles

3.1. Etika Aristotelian

3.1.1. Apa itu Etika?

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Terminologi “etika” secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau karakter yang berkaitan dengan tindakan manusia.¹⁰ Etika berbeda dengan etiket. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya berurusan dengan sopan santun tanpa menyentuh moralitas.¹¹ Lapangan etiket hanya berkisar pada tindakan dari sudut pandang eksternal, akan tetapi etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh, utuh, dan mendalam. Artinya, etika tidak hanya bersoal jawab dengan cetusan tindakan manusia secara lahiriah, akan tetapi ia juga menyelidiki motivasi dan aneka dimensi yang mendasari tindakan tersebut.

Karena etika itu berurusan dengan tindakan manusia, maka ia memiliki karakter praktis (karena tindakan itu selalu konkret). Artinya, etika itu langsung berkaitan dengan hidup manusia dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena ia berkarakter praktis, etika juga langsung mengantar manusia untuk bertindak baik dan menjadi baik. Etika yang digagas oleh Aristoteles adalah etika yang mengarahkan kepada hidup yang baik. Dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang hidup yang baik.¹² Manusia itu seharusnya hidup dan bertindak sedemikian rupa

10 Armada Riyanto, CM, **Etika**, STFT Widya Sasana, Malang, 2000, hal.2.

11 **Ibid**

12 **Bdk.** Franz Magnis Suseno, **Tiga Belas Model Pendekatan Etika**, Kanisius,

sehingga mencapai hidup yang baik, bermutu, berhasil, dan bahagia. Bahagia adalah tujuan terakhir hidup manusia, dan etika menawarkan petunjuk untuk mencapainya.

3.1.2. Etika Berkaitan dengan Nilai-Nilai

Etika mempunyai kaitan dengan aneka nilai yang ada. Etika dengan demikian mengajukan nilai-nilai bagaimana manusia itu dapat hidup secara baik. Ia juga menawarkan pola-pola etis dan aneka pertimbangan moral dalam menguji tindakan manusia. Lebih lanjut, dengan menawarkan nilai hidup baik tersebut, etika juga hendak membawa manusia kepada tingkah laku yang baik, sikap yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kehidupan, dan mengedepankan kemanusiaan.

Lalu apa sebenarnya nilai itu? Apakah ia sama dengan hukum? Atau apakah ia identik dengan nilai-nilai agama? Nilai sebenarnya adalah rangkaian pertimbangan yang diproduksi oleh akal budi manusia. Manusia di sini bukan manusia yang beragama tertentu, berkebudayaan tertentu, atau berkebangsaan tertentu. Ia adalah manusia sejauh manusia. Artinya, dari dirinya sendiri ia mempunyai kecemerlangan untuk membedakan mana yang baik dan buruk oleh karena ia memiliki akal budi. Maka nilai dalam etika itu harus bersesuaian dengan akal budi manusia. Etika dengan demikian tidak tunduk kepada nilai agama ataupun adat tertentu.

3.1.3. Etika dan Tindakan Manusia

Manusia itu bertindak dan harus bertindak.¹³ Bertindak adalah ciri khas setiap makhluk hidup, dan ternyata manusia juga termasuk di dalamnya, maka manusia pasti bertindak. Kalau setiap makhluk hidup itu bertindak (dan demikian juga dengan manusia), lalu apa yang membedakan tindakan manusia dengan tindakan makhluk yang lain? Tindakan manusia adalah pencetusan dirinya sebagai manusia. Tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling umum dan lengkap. Tindakan adalah sarana yang paling meyakinkan untuk menghadirkan diri secara penuh

Yogyakarta, 1997, hal.39.

dan membuatnya sungguh manusiawi. Di sini tampak karakter yang amat kompleks dalam tindakan manusia.

Dalam bertindak sejauh sebagai manusia, ia membuat dirinya sebagai subjektindakan. Artinya, dia menyadaritindakannya dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Di sini manusia tidak hanya tunduk pada dorongan naluri dan rangsangan belaka, akan tetapi mengarahkannya kepada suatu tujuan yang hendak dicapai. Manusia ternyata menyertakan akal budinya dalam bertindak. Inilah yang membedakan secara tegas manusia dengan binatang. Inilah pula yang membedakan tindakan yang diambil oleh manusia dan aktifitas binatang.

Dalam kejadian sehari-hari, terkadang justru dijumpai tindakan manusia yang tidak menunjukkan karakter di atas. Cukup banyak ditemui tindakan manusia yang justru amat brutal dan bersinggungan dengan karakter kebinatangan. Ada manusia yang membunuh manusia lain, gila, mencari untung sambil tega merugikan sesama, membakar tanpa rasa bersalah, dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini dijelaskan? Bagaimana pula hal ini disoroti dari segi etis?

3.2. Mengupayakan Kacamata Etika Aristotelian dalam Aktivitas Ekonomi

Etika itu menyoal hidup praktis manusia, maka ia pasti bersinggungan dengan realitas konkret hidup manusia. Hubungan etika dengan realitas keseharian ini terjadi karena ilmu yang satu ini menyentuh tindakan manusia. Tindakan manusia ini bukan sembarang tindakan, akan tetapi ia adalah suatu *actus humanus* (tindakan tahu, mau, bebas) yang terarah kepada kebaikan. Lalu apa saja yang menjadi lapangan praktis dari tindakan manusia? Yang bisa dimasukkan di sini adalah semua kegiatan ekonomi, bisnis, dan kemasyarakatan. Tampak bahwa ternyata etika mempunyai relasi dengan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, di mana relasi ini ditampakkan dalam tulisan Aristoteles?

Kita mulai dengan kalimat awal dari buku Aristoteles berjudul *Nicomachean Ethics* atau Etika Nikomakea. *Nicomachean Ethics* secara

garis besar adalah buku yang berisikan gagasan Aristoteles tentang Etika Hidup manusia. Frase pertama buku *Nicomachean Ethics* berbunyi: “*Every craft and every investigation, and likewise every action and decision, seems to aim at some good; hence the good has been well described as that at which everything aims.*”¹⁴

Frase pertama *Nicomachean Ethics* ini setidaknya mengatakan dua hal penting, yaitu: 1). Etika Aristoteles adalah etika yang terarah kepada kebaikan, dan 2). Setiap aktivitas manusia itu terarah kepada kebaikan. Dua hal penting ini menjiwai seluruh etika Aristotelian.

Di bagian pertama ditegaskan bahwa etika Aristoteles adalah etika kebaikan, artinya dia menggariskan bahwa setiap aktivitas manusia itu memiliki tujuan mengejar kebaikan. Maka, kebaikan adalah “itu yang dituju” atau “itu yang dikejar.” Titik tolak Aristoteles yang mengedepankan *telos* (tujuan) ini dapat dipandang sebagai cikal bakal teleologisme etika. Lalu, apa yang menggerakkan kehendak dan tindakan manusia? Yaitu yang baik. Yang baik di sini lantas sekaligus memiliki karakteristik ganda, yaitu yang baik sebagai **tujuan** dan yang baik sebagai **nilai**. “Yang baik” sebagai tujuan artinya “yang baik” sebagai sasaran tindakan. “Yang baik” sebagai nilai, maksudnya kebaikan itulah sang penggerak atau motor yang memotivasi kehendak dan tindakan manusia. “Yang baik” sebagai tujuan juga mengindikasikan langsung kaitan antara aktivitas dan sasaran tindakan. Manusia bertindak selalu dengan tujuan mengejar kebaikan tertentu, apakah itu kebaikan bagi dirinya atau kebaikan yang dimaksudkan untuk kepentingan lain yang mengatasi dirinya.

Lebih lanjut, Aristoteles memiliki formulasi yang sangat tegas mengenai makna “baik.” Berikut kutipannya:

*Then surely knowledge of this good is also of great importance for the conduct of our lives, and if, like archers, we have a target to aim at, we are more likely to hit the right mark. If so, we should try to grasp, in outline at any rate, what the good is, and which science or capacity is concerned with it.*¹⁵

14 Aristotle, *Nicomachean Ethics*, 1094a 1-5

15 **Bdk.** Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (1094a23-25).

Menurut kutipan di atas, "baik" sebagai nilai langsung menunjuk pada kualitas yang memikat akal budi untuk menggerakkan kehendak. "Baik" di sini misalnya berupa kepuasan, afeksi, kekerasan, kenikmatan, kelegaan, cinta, kegembiraan, pujian, dan seterusnya. Pada umumnya harus dikatakan bahwa "baik" sebagai tujuan dan nilai itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. "Baik" sebagai nilai itu bersifat *desiderabilis* (diinginkan). Karena itu, ungkapan "*bonum faciendum malum vitandum*" (menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik) adalah tepat sejauh memaksudkan bahwa hanya yang baik sajalah yang memiliki daya keharusan untuk dilakukan. Daya keharusannya terletak pada kebenaran bahwa *bonum* (kebaikan) membawa kepada kebahagiaan. Jadi keharusannya bukan hanya diperintahkan, melainkan terutama karena berhubungan dengan imperatif dan kodrat kebaikannya. Jika tindakan manusia menurut Aristoteles terarah kepada kebaikan, maka segala cetusannya pun sebenarnya harus bermotifkan kebaikan dan demi tercapainya kebaikan, sama halnya dengan tindakan ekonomi sekalipun.

3.3. Bisakah Korporasi Tunduk pada Etika?

Penjelasan di atas menegaskan bahwa etika melekat pada manusia dan tindakannya. Dalam konteks lumpur Lapindo, pertanyaan yang mengemuka adalah: Bisakah suatu korporasi (yang bukan manusia) bertanggungjawab atas suatu perkara yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas? Bukankah suatu korporasi bukanlah manusia yang berakal budi? Harus diakui bahwa menjawab pertanyaan di atas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk menjawabnya terlebih dahulu harus dikaji kembali hakikat dari etika dan kegiatan ekonomi/bisnis. Kita akan membahasnya satu per satu.

Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah aktivitas manusia dalam mengatur kehidupannya, rumah tangga, dan masyarakat (*oikos* dan *nomos*). Dalam kerangka kebaikan bersama-lah suatu kegiatan ekonomi dijalankan (tentu kebaikan berurusan dengan etika). Jadi, ekonomi (termasuk di dalamnya kegiatan

berbisnis yang dijalankan oleh korporasi) tidak bisa dilepaskan begitu saja dari etika!

Lantas, pertanyaan kita adalah: apakah suatu korporasi bisa menjalankan kegiatan bisnisnya sendiri? Apakah di dalamnya suatu keputusan diambil oleh gedung suatu korporasi (yang adalah benda mati)? Bukankah yang menjalankan suatu korporasi adalah manusia-manusia yang berakal budi juga? Karena akal budi, tanggung jawab, dan kebebasan adalah elemen-elemen fundamental yang menyusun dimensi-dimensi hidup manusia, maka manusia-manusia yang terlibat di dalam suatu korporasi itu tentu juga tidak bisa lepas dari tuntutan etis untuk mewujudkan kebaikan hidup bersama.

Gagasan filosofis-etis yang dikemukakan oleh Aristoteles memberi kita kontribusi yang amat besar bagi pemahaman prinsipil bahwa setiap tindakan manusia tidak luput dari etika. Ketika manusia senantiasa mengejar dan berusaha meraih kebaikan dan kebahagiaan hidupnya, hidup manusia sekaligus memiliki dimensi dan tuntutan etis. Karena tindakan dan aktivitas ekonomi adalah aktivitas manusia, maka aktivitas tersebut juga tidak luput dari sorotan dan tuntutan etis. Maka, pengandaian etis dari setiap kegiatan ekonomi menjadi suatu keniscayaan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi harus mengandaikan atau mengasumsikan etika. Contoh konkretnya, dalam dunia bisnis yang kompetitif dewasa ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk “rajin” mengadopsi teknologi yang mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk dengan biaya yang seefisien mungkin. Mereka juga harus membangun kepedulian sosial (*corporate social responsibility*). Di era kompetisi global saat ini, masyarakat menghendaki juga adanya tanggungjawab sosial dari korporasi.

Gagasan filosofis-etis Aristotelian bukan hanya memberi inspirasi bagi motif hidup manusia etis, melainkan juga mengoreksinya. Kebaikan dan kebahagiaan dalam konteks kehidupan bersama dalam realitas konkret, terutama dalam aktivitas ekonomi global (dengan studi kasus pada fenomena korporasi global), kerap didapati kenyataan bahwa motivasi dasar perusahaan hanya semata-mata mencari laba dan kurang

mempedulikan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka seringkali hanya memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, tetapi kurang memberi perhatian yang sepadan bagi ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lingkungan. Para buruh kerap diberi upah yang tidak layak dan tidak mendapat jaminan atas keselamatan kerja. Konservasi dan pelestarian alam kerap terabaikan oleh hasrat eksploitasi yang kian menggila. Banyak kasus kerusakan lingkungan diakibatkan oleh perilaku perusahaan, misalnya pembuangan limbah yang sembarangan, penggundulan hutan, pendangkalan sungai, polusi udara yang seringkali melebihi ambang batas, dan lain-lain.

Setelah isu kewajiban sosial perusahaan makin *santer* dibahas secara lintas sektoral, lintas disiplin ilmu, dan lintas negara, lahirlah pasal 74 Undang-Undang RI no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Sanksi dan hukuman mengancam jika perusahaan tidak melaksanakannya dengan baik. Perusahaan dengan demikian tidak bisa lagi seenaknya menghabiskan sumber alam demi kepentingan ekonomi, melainkan turut melestarikannya pula. Di satu sisi, pemenuhan akan kewajiban sosial ini memberi penghargaan kepada masyarakat sebagai pemilik *economis resources*, dan di sisi lain ia membangun citra publik si perusahaan itu sendiri.

3.4. Bagaimana Menjalankan Bisnis yang Etis?

Suatu bisnis layak disebut bisnis yang “etis” bila bisnis tersebut terbukti membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Kemampuan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang etis dalam berbisnis seharusnya merupakan kesadaran akan prinsip teleologisme etika di atas. Dengan kata lain, dari *effective training* dan *good habits* muncullah keutamaan moral dan karakter personal.

Kemampuan orang untuk bertindak etis itu berkembang secara bertahap, dengan berangkat dari tahap-tahap yang bersifat ego-sentris, kemudian melangkah ke tahap yang lebih bersifat komunal, dan akhirnya

dapat memuncak pada tahap yang bersifat *fully human*. Seorang pebisnis yang berjiwa ego-sentris merasa telah berbuat baik bila bisnisnya sudah menguntungkan dirinya. Seorang pebisnis yang berjiwa komunal merasa telah berbuat baik bila bisnisnya sudah menguntungkan teman-teman dan orang-orang terdekatnya. Hanyalah seorang pebisnis yang berjiwa *fully human* baru merasa telah berbuat baik bila bisnisnya telah mendatangkan berkat bagi kemanusiaan, membawa manfaat bagi banyak orang.

Secara sederhana, kebijakan bisnis yang bersifat utilitarian itu dapat dipahami sebagai kebijakan bisnis yang mendatangkan berkat bagi paling banyak pihak. Kebijakan-kebijakan bisnis yang utilitaristik semacam itu biasanya hanya bisa muncul dari pebisnis yang punya keutamaan moral dan karakter persnal yang bermutu tinggi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh American Management Association, ditunjukkan bahwa pada 1976 harga barang dan jasa naik tajam sekitar 15% karena praktek-praktek kurang etis dalam bisnis, dan hampir 20% kebangkrutan terjadi karena praktek-praktek yang tidak etis.¹⁶

3.5. Relevansi Pemahaman Etika Aristotelian dalam Studi Kasus Lumpur Lapindo

Manusia Indonesia dalam kacamata studi kasus Lapindo sebagai korporasi rupanya tidak menyadari hakikat mereka sebagai makhluk yang ada bersama dengan manusia lain. Di sana semangat egoisme dan cari untung sendiri tanpa mau tahu penderitaan orang lain merebak. Dewasa ini, negara (yang dalam gagasan Aristoteles disebut *polis*) tidak dianggap sebagai lembaga untuk semakin memanusiawikan manusia Indonesia. Negara dan pemerintah bahkan terkesan sudah dibeli oleh uang dan kepentingan mereka. Keterarahan untuk mengejar kebaikan secara pribadi dan bersama dalam negara mulai luntur.

16 American Management Assosoation, dalam: Simcha, B Werner "The Movement for Reforming American Bussines Ethics," dalam **Journal of Bussines Ethics**, vol 11, no.1, January 1992, hal 65-66.

Dalam situasi yang demikianlah gagasan Aristoteles perlu disimak secara lebih mendalam. Gagasan ini perlu dan mendesak untuk digeluti agar kehidupan bersama manusia Indonesia kembali memeluk kebaikan sebagai hal yang harus dikejar. Maka, hal-hal penting yang dapat ditarik bagi masyarakat dewasa ini adalah:

- a) Kebaikan perlu dikedepankan oleh setiap individu. Setiap warga hendaknya menyadari bahwa tujuan terdalam dari kehadirannya sebagai manusia adalah pencapaian kebaikan. Jika setiap orang menginsyafi bahwa masing-masing terarah kepada apa yang baik, maka masyarakat yang terbentuk pun akan terwarnai olehnya. Bagi Lapindo, hal ini menjadi “ladang” permenungan untuk menyadari perannya sebagai agen kebaikan yang seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat lewat kegiatan bisnisnya.
- b) Negara perlu menyadari fungsinya sebagai pengemban amanat bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Secara konkret hal ini dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan, pejabat, anggota MPR/DPR, dan para pelaku politik. Kebaikan bersama itu menjadi syarat mutlak dalam setiap aktivitas, juga dalam kegiatan bisnis. Kebaikan yang hendak diarah bukanlah kebaikan pribadi maupun golongan, maka kepentingan umum wajib diutamakan. Konsekuensinya dalam kasus Lapindo: segala hal harus ditujukan kepada pemenuhan kepentingan umum (masyarakat korban lumpur). Tidak perlu bersilat lidah dan mengarahkan bencana ini sebagai bencana nasional, karena sebagai korporasi penyebab bencana ini, merekalah yang pertama-tama harus bertanggungjawab.
- c) Kebaikan yang diusahakan ini harus menjadi *actus humanus*, artinya ia harus diusahakan secara sadar dan dimauai oleh manusia-manusia Indonesia (terutama oleh pihak Lapindo). Konsekuensinya: tindakan bisnis pun akhirnya merupakan tindakan sadar warga (yang berusaha menjadi manusia yang berkeutamaan) dan yang hendak menggapai kebaikan bersama.

4. Penutup

Etika sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam kacamata etis, kegiatan ekonomi berarti suatu penataan hidup bersama yang tidak hanya berhenti kepada pencapaian laba sebanyak-banyaknya, melainkan juga mengintegrasikan dimensi-dimensi kehidupan manusia secara lebih utuh dan luas. Hal ini sesuai dengan hakekat kemanusiaan itu sendiri yang utuh dan integral. Manusia adalah makhluk multi dimensional. Maka, ini berarti bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis juga seharusnya diarahkan kepada peraihian kebaikan bersama. Kebaikan berarti adalah soal etika sehingga bisnis sebenarnya tidak pernah boleh dilepaskan dari etika.

Keterarahan bisnis kepada etika ini mengandung banyak implikasi, dan salah satu diantaranya adalah mengedepankan kebaikan. Kebaikan *in se* tidak menyertakan keburukan ada dalam dirinya. Jika keburukan tidak boleh ada dalam kebaikan *in se*, maka segala upaya, cara, dan tingkah laku ekonomi yang buruk harus pula ditolak apabila aktivitas ekonomi bertujuan demi kebaikan hidup manusia. Konkretnya, perusakan lingkungan, lepas tangan atas dampak sosial yang muncul, dan lain sebagainya, sudah semestinya dikubur apabila kita mau menghidupi suatu realitas kehidupan bisnis yang benar, berperikemanusiaan, dan bermartabat. Korporasi sebagai contoh konkret dari aktualisasi kegiatan ekonomi mempunyai tanggungjawab moral membawa kebaikan bagi hidup manusia. Tuntutan etis muncul dari pemahaman dasar bahwa korporasi juga bisa dikategorikan sebagai aktor moral, meskipun bukan *person* moral.

Kontribusi kacamata etis Aristotelian mendesak kita untuk tidak memutus kegiatan hidup sehari-hari dari etika. Etika Aristoteles adalah etika kebaikan, artinya ia menggariskan bahwa setiap aktivitas manusia bertujuan mengejar kebaikan. Etika ini tidak melupakan tindakan-tindakan yang bersifat aktivitas ekonomis.

Ekonomi, seperti bidang-bidang lainnya, mempunyai kedudukan

dan tujuannya sendiri. Namun dalam konteks kehidupan masyarakat, ekonomi mempunyai fungsi instrumental, yaitu ikut menjalankan usaha demi mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan orientasi teleologis ini dapat dinyatakan bahwa keberhasilan ekonomi pada akhirnya terletak pada kemampuannya untuk ikut melaksanakan dan mencapai tujuan hidup masyarakat pada umumnya sebagai tuntutan etis tersebut, dan kegagalan ekonomi pada akhirnya tergantung pada ketidakmampuannya untuk mewujudkan tuntutan etis tersebut. Kesimpulannya, aktivitas berbisnis pun menjadi kotor dan *inhuman* ketika dilepaskan dari kehidupan etis dan tidak terarah kepada kebahagiaan.

Agustinus W. Dewantara

Pengajar di STKIP Widya Yuwana, Madiun, Jawa Timur. Mengajar dan banyak menggumuli bidang-bidang etika (filsafat moral), kemanusiaan, dan religiusitas.

Daftar Rujukan

Buku-buku

- Aristotle, (translated by Ernest Bakker) **Politics**, Oxford: Oxford University Press, 1995
- _____, (translated by. Terence Irwin), **Nicomachean Ethics**, Cambridge: 1985
- Bertens, K, Dr, **Sejarah Filsafat Yunani**, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- _____, **Keprihatinan Moral**, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Beuchamp, T./N. Bowie, **Ethical Theory and Bussines**, Engleword Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, second edition, 1983
- Clifford Williams, **Teaching Virtues and Vices, Philosophy Today**, Fall 1989
- Finance, De Joseph, S.J., **An Ethichal Inquiry**, Roma: 1991
- Goldthwait, John.T., **Values, What They Are and How We Know Them**, Amherst, New York, Prometheus Books, 1996
- Hadiwijono, Harun, Dr, **Sari Sejarah Filsafat Barat I**, Yogyakarta: Kanisius, 1980

- Riyanto, Armada, CM, **Etika**, Malang: STFT Widya Sasana, 2000
- _____, **Filsafat Politik/Kenegaraan (Filsafat Pancasila)**,
Malang: STFT Widya Sasana, 2000
- Rosen, Bernard/Arthur, **Ethics in the Undergraduate Curriculum**,
Hasting-on-Hudson, The Hasting Centre, 1980
- Simcha, B Werner "The Movement for Reforming American Bussines
Ethics," dalam **Journal of Bussines Ethics**, vol 11, no.1, January
1992
- Suseno, Franz Magnis, **Tiga Belas Model Pendekatan Etika**,
Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Winkler, ER/JR Coombs, **Aplied Ethics: A Reader**, Oxford UK/
Cambridge, USA, Blackwell, 1993
- Yayasan Cipta Loka Caraka, **Ensiklopedi Populer Politik
Pembangunan Pancasila**, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1984

Internet

- <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2004/02/10/kejahatan-korporasi/>
- <http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/>
- [http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/18/1826/5/101/
Genangan-Lumpur- Lapindo-makin-Bahayakan-Sidoarjo#at](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/18/1826/5/101/Genangan-Lumpur-Lapindo-makin-Bahayakan-Sidoarjo#at)
- <http://Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003>